

**PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA**

(Tesis)

oleh

**IMRON ROSYADI
NPM 2121021010**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA

Oleh

Imron Rosyadi

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia, meskipun telah mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Ketimpangan ekonomi di Indonesia dapat digambarkan melalui pola segitiga terbalik, di mana sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan, sementara segelintir kelompok menikmati kesejahteraan. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia menurun, masih ada daerah, terutama di Pulau Sumatera, yang mencatatkan angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Dalam hal ini, inklusi keuangan menjadi salah satu solusi yang dianggap efektif untuk mengurangi kemiskinan. Akses terhadap layanan keuangan yang memadai memberikan peluang bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tabungan, kredit, atau asuransi. Selain itu, stabilitas harga juga merupakan hal yang penting dalam pengendalian kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan inflasi terhadap pengurangan kemiskinan di Pulau Sumatera pada periode 2017 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Indeks Inklusi Keuangan (IIK) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, inflasi juga berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci : Indeks Inklusi Keuangan, Inflasi, Kemiskinan, Data Panel, Ekonomi

ABSTRACT

THE EFFECT OF FINANCIAL INCLUSION ON POVERTY RATE IN SUMATRA ISLAND

By

Imron Rosyadi

Poverty is still one of the main problems faced by developing countries like Indonesia, despite having experienced significant economic progress in recent decades. Economic inequality in Indonesia can be illustrated through an inverted triangle pattern, where most people live in poverty, while a handful of groups enjoy prosperity. Although the poverty rate in Indonesia is decreasing, there are still regions, especially on the island of Sumatra, that record higher poverty rates than other regions. In this case, financial inclusion is one of the solutions that is considered effective to reduce poverty. Access to adequate financial services provides opportunities for poor people to improve their well-being through savings, credit, or insurance. In addition, price stability is also important in poverty control. This study aims to analyze the influence of financial inclusion and inflation on poverty reduction on the island of Sumatra in the period 2017 to 2023.

Research methodology: This study uses a quantitative approach with panel data from 10 provinces on the island of Sumatra.

Results: The results of the regression analysis showed that the Financial Inclusion Index (IKK) had a significant negative effect on the poverty rate. In addition, inflation also has a significant negative effect on the poverty rate.

Keywords: Financial Inclusion Index, Inflation, Poverty, Panel Data, Economy

**PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA**

Oleh:

IMRON ROSYADI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU EKONOMI**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA**

Nama Mahasiswa : **Amron Rosyadi**

No. Pokok Mahasiswa : 2121021010

Program Studi : Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E, M.Si
NIP. 195603251983031002

Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si
NIP.197707292005011001

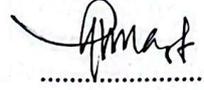
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Asih Murwiati, S.E, M.E
NIP. 197404102008122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

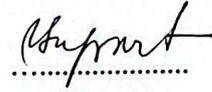
Ketua : Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.


.....

Sekretaris : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.


.....

Penguji I : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.


.....

Penguji II : Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M.

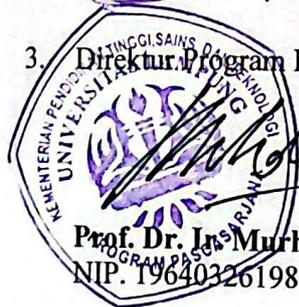

.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. In Murhadi., M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 5 Juni 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku

Bandar Lampung 18 Juni 2025



IMRON ROSYADI

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Imron Rosyadi lahir di Jakarta, 15 Februari 1984, Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Syarifudin Saarih dan Ibu Tuti Mulyati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD 04 Pondok Pinang Jakarta dan lulus tahun 1996. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Makarya Tanah Kusir Jakarta dan lulus tahun 2001. Pada tahun 2001, penulis lulus dari SMA Negeri 29 Jakarta lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan Tesis ini, Penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana S2 Pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Saat ini penulis bekerja pada Instansi Pemerintah Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji sebagai Fungsional Statistisi Ahli Muda.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar pascasarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya tesis ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Tesis ini saya persembahkan untuk : Istri ku tersayang terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Anak ku Humaira Maharani Karim dan Hilmi Alhafeezy Karim terimakasih telah menjadi *booster* penyemangat dalam mengerjakan tesis ini. Semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.

Dosen – dosen Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Lampung serta kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan tesis ini untuk kalian semua.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kesehatan, serta kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr.Asih Murwiati, S.E, M.E selaku Ketua Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Ekonomi (MIE) di Universitas Lampung (Unila)
3. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Deddy Yuliawan, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.

5. Kedua Orang Tua yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, Bapak Syarifudin Saari (alm) dan Ibu Tuti Mulyati (almh), kedua Mertua Bapak Masjari dan Ibu Naziroh, terima kasih atas doa dan dukungannya, baik moril. Terima kasih atas kasih sayang yang selama ini telah dicurahkan untukku. Semoga anakmu ini bisa menjadi anak yang kelak akan membanggakan dan membahagiakanmu.
6. Istriku tersayang Solihah-ku Eka Pratiwi Arnaz, terima kasih atas support mu selama ini, terima kasih pula atas kasih sayang yang telah diberikan untukku.
7. Kedua Anak-ku Humaira Maharani Karim dan Hilmi Alhafeezy Karim yang telah menemani dan memberikan semangat kepadaku dan memotivasi untuk tetap bertahan dan tetap bersemangat untuk menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Universitas Lampung maupun selama penulisan Tesis ini.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Teori	12
2.1.1 Inklusi Keuangan	12
2.1.2 Inflasi	16
2.1.3 Kemiskinan	19
2.1.4 Inklusi keuangan dan kemiskinan	24
2.2 Kerangka Konseptual	30
2.3 Pengembangan Hipotesis	31
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian	35
3.2 Jenis dan Sumber Data	35
3.3 Metode Analisis	36

3.3.1 Variabel dan Pengukuran	36
3.3.2 Analisis Deskriptif	39
3.3.3 Analisis Regresi Data Panel	39
3.3.4 Pengujian Pemilihan Permodelan	41
3.3.5 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.3.6 Uji Simultan (Uji-F).....	47
3.3.7 Uji Goodness of Fit (Uji Adjusted R ²).....	47
3.3.8 Uji Hipotesis (Uji t).....	48
3.3.9 Pembentukan Model Penelitian.....	49
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Deskriptif Objek Penelitian.....	50
4.2 Analisis Deskriptif	51
4.3 Pemilihan Model Terbaik.....	55
4.4 Uji Asumsi Klasik	57
4.4.1 Uji Normalitas	57
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	57
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	58
4.4.4 Uji Autokorelasi	59
4.5 Koefisien Determinasi.....	59
4.6 Uji F	60
4.7 Hasil Analisis Regesi Data Panel.....	60
4.3 Hasil Uji t	61
4.4 Analisis dan Pembahasan	62
V. SIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	65

5.3 Keterbatasan Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Angka Kemiskinan di Indonesia	2
Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera September 2024	3
Gambar 1. 3 Pertumbuhan Tingkat Inklusi Keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan dan tingkat penggunaan akun	7
Gambar 2. 1 Pengaruh Pembangunan Keuangan Pada Kemiskinan.....	29
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual	31
Gambar 3. 1 Pemilihan Model Dalam Data Panel	43
Gambar 4. 1 Perkembangan Indeks Inklusi Keuangan Pulau Sumatera Tahun 2017-2023	51
Gambar 4. 2 Indeks Inklusi Keuangan di Pulau Sumatera Tahun 2023	52
Gambar 4. 3 Peta Tematik Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera Tahun 2023	53
Gambar 4. 4 Peta Tematik Indeks Inklusi Keuangan di Pulau Sumatera Tahun 2023.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel Penelitian.....	36
Tabel 4. 1. Hasil Uji Hausman.....	55
Tabel 4. 2. Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	56
Tabel 4. 3. Hasil Uji Jarque-Bera.....	57
Tabel 4. 4. Nilai <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF).....	58
Tabel 4. 5. Hasil Uji Likelihood Ratio.....	58
Tabel 4. 6 Hasil Uji Durbin Watson.....	59
Tabel 4. 7 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4. 8 Hasil Uji <i>t</i>	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Common Effect Model</i>	73
Lampiran 2 <i>Fixed Effect Model</i>	74
Lampiran 3 <i>Random Effect Model</i>	75
Lampiran 4 Uji Hausman	76
Lampiran 5 Uji Lagrange Multiplier.....	77
Lampiran 6 Uji Normalitas	78
Lampiran 7 Uji Multikolinearitas.....	79

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

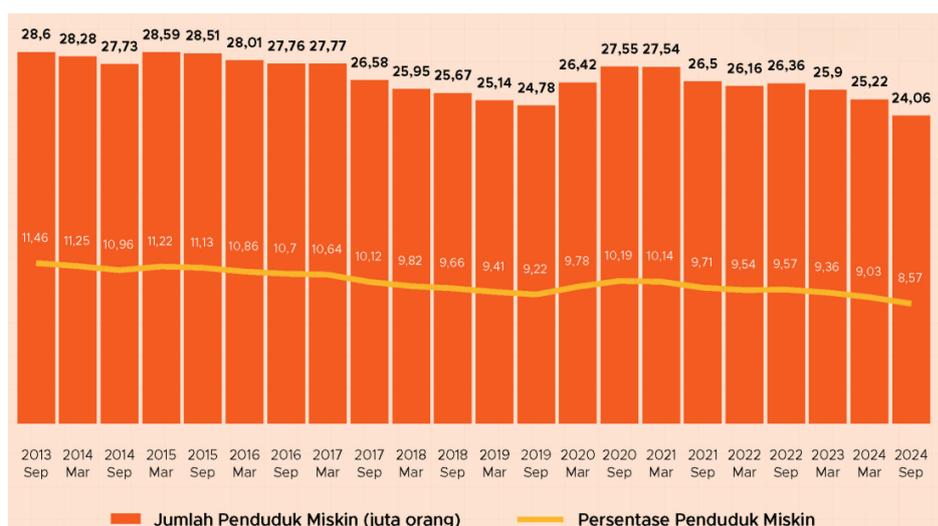
Negara berkembang, seperti Indonesia, sering kali menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemajuan ekonomi yang merata. Fenomena ini dapat digambarkan dengan menggunakan pola segitiga terbalik, di mana di dasar segitiga terdapat lapisan besar dari masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, sedangkan di puncaknya terdapat kelompok kecil yang menikmati kekayaan dan kesejahteraan. Pola ini menggambarkan ketimpangan ekonomi yang terjadi di banyak negara berkembang, di mana sebagian besar penduduk tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai (Rahman et al. 2019)

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang harus diatasi dengan serius. Negara berkembang cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dan masalah ini seringkali terkait dengan faktor-faktor seperti ketidakmerataan distribusi pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses terhadap layanan dasar, dan layanan keuangan. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta menghambat perkembangan ekonomi secara keseluruhan (Deni et al, 2020).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang terus menjadi perhatian global, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Walaupun Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan ekonomi dalam

beberapa dekade terakhir, masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan serius yang tidak mudah diatasi (Deni et al, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,57% dari total populasi atau menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023. Jumlah penduduk miskin di Indonesia setara dengan sekitar 24,06 juta penduduk. Angka ini terus menunjukkan ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang signifikan, terutama di daerah-daerah tertentu, seperti di Pulau Sumatera yang mencatatkan angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

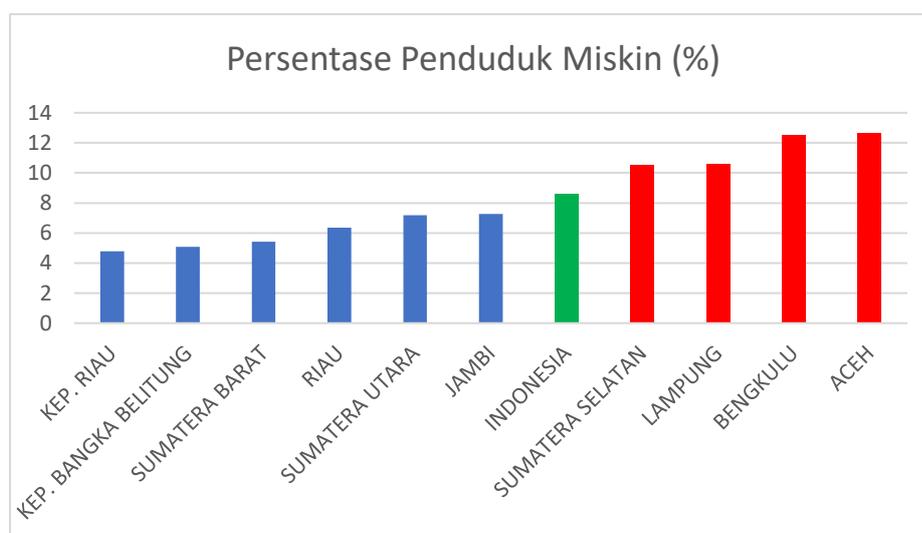


Gambar 1. 1 Perkembangan Angka Kemiskinan di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pulau Sumatera, yang terdiri dari 10 provinsi, merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di beberapa provinsi. Beberapa provinsi di Sumatera, seperti Aceh, Lampung, dan Sumatera Selatan, memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian, rendahnya tingkat pendidikan di beberapa daerah, dan terbatasnya akses terhadap layanan dasar.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera mencapai 5,24 Juta Jiwa atau 21,80% dari total keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 2024 antara lain adalah Aceh (12,64%), Bengkulu (12,52%), Lampung (10,62%), dan Sumatera Selatan (10,51%). Berikut merupakan perbandingan kemiskinan di Pulau Sumatera.



Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Sumatera September 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik

Provinsi-provinsi seperti Sumatera Selatan (10,51%), Lampung (10,62%), Bengkulu (12,52%), dan Aceh (12,64%) memiliki persentase penduduk miskin yang lebih dari 10%, yang menandakan bahwa kemiskinan di daerah-daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi umum di Indonesia. Angka kemiskinan yang lebih tinggi dari rata-rata nasional ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam hal perekonomian, ketimpangan sosial, dan akses terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas 10% ini seharusnya mendapat perhatian khusus dalam hal kebijakan pembangunan, dengan fokus pada program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kemiskinan sering kali menghambat akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup mereka. Selain itu, kemiskinan juga berdampak pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperburuk ketidaksetaraan pendapatan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama di wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi seperti beberapa provinsi di Pulau Sumatera (Ningrum, 2024).

Salah satu cara yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Inklusi keuangan merujuk pada penyediaan layanan jasa keuangan yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok berpendapatan rendah dan sulit mengakses layanan keuangan formal. Dengan adanya akses ke layanan keuangan, masyarakat, khususnya kelompok miskin, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tabungan, kredit, atau asuransi. Layanan keuangan ini juga memungkinkan mereka untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Ariani et al, 2024).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengertian inklusi keuangan yaitu tersedianya berbagai lembaga keuangan, produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan inklusi keuangan itu sendiri yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan terhadap pendapatan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan memiliki empat target yang antara lain:

1. Memperluas akses publik terhadap produk dan layanan jasa keuangan organisasi.

2. Menawarkan berbagai produk atau jasa keuangan dari penyedia jasa keuangan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
3. Meningkatkan produk atau jasa keuangan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.
4. Meningkatkan kualitas produk atau jasa keuangan.

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. Inklusi keuangan diukur menggunakan indikator penggunaan (usage) produk dan/atau layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan diukur menggunakan indikator penggunaan (usage) produk dan/atau layanan jasa keuangan. (Laporan SNLIK 2024; OJK BPS)

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2016) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai

“... the effective access and use by individuals and firms of available, affordable, convenient, quality, and sustainable financial services from formal providers ...”

“...akses dan penggunaan yang efektif oleh individu dan perusahaan atas layanan keuangan yang tersedia, terjangkau, nyaman, berkualitas, dan berkelanjutan dari penyedia formal...”

UNCTAD berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta pembangunan sosial dan ekonomi. Sudut pandang UNCTAD pada dasarnya sejalan dengan yang dikemukakan oleh World Bank. Inklusi keuangan menurut World Bank (2017) sebagai berikut.

“... individuals and businesses have access to useful and affordable financial products and services that meet their needs – transactions, payments, savings, cred....”

”...individu dan dunia usaha memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan yang berguna dan terjangkau yang memenuhi kebutuhan mereka – transaksi, pembayaran, tabungan, kredit....”

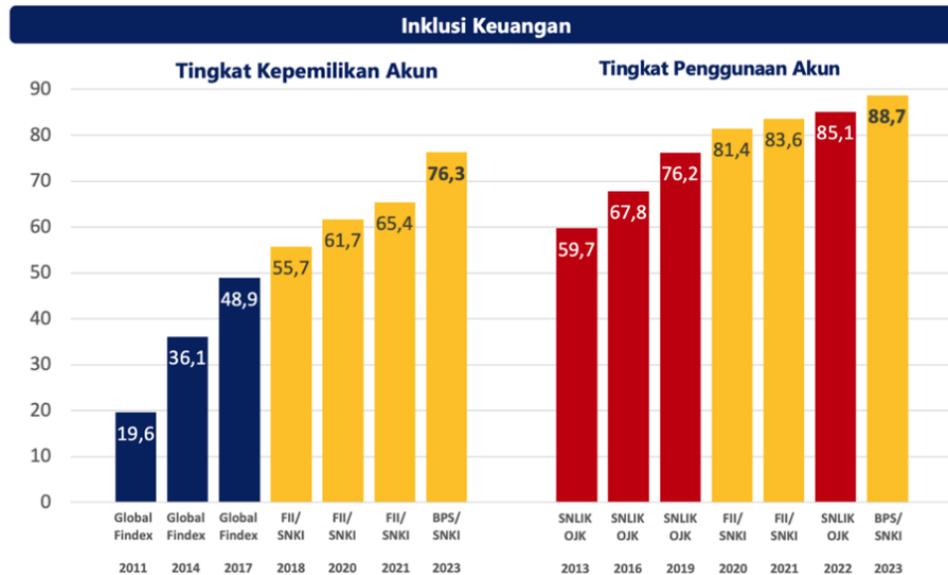
Tingkat inklusi keuangan dapat dilihat dari berbagai indikator yang menjadi tolak ukur inklusi keuangan. Menurut Sarma (2018), ada 3 indikator yang menjadi dasar inklusi keuangan, antara lain:

1. Indeks penetrasi perbankan, indikator ini diukur menggunakan jumlah akun rekening bank.
2. Indeks ketersediaan jasa perbankan, diukur dari jumlah kantor dan Pelayanan Perbankan.
3. Indeks penggunaan jasa perbankan, yang diukur dari kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Inklusi keuangan memerlukan suatu ukuran kinerja yang biasa disebut *Index Financial Inclusion* (IFI). IFI ini dapat menggabungkan beberapa informasi dari berbagai dimensi dari sebuah sistem inklusi keuangan yaitu akses, penggunaan, dan kualitas dari layanan perbankan. Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan sebagai variabel *dependen* adalah variabel indeks inklusi keuangan yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan OJK yaitu Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

Inklusi keuangan merupakan hal yang penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, karena memberikan kesempatan kepada seluruh segmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian formal. Namun, meskipun Indonesia mengalami kemajuan dalam hal inklusi keuangan, akses terhadap layanan keuangan formal masih terbatas bagi sebagian besar masyarakat di daerah-daerah terpencil, terutama di Pulau Sumatera. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, tingkat inklusi keuangan Indonesia masih tergolong rendah, dengan hanya sekitar 75,02% dari total populasi yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Berikut merupakan pertumbuhan tingkat inklusi keuangan berdasarkan kepemilikan dan penggunaan akun.



Gambar 1. 3 Pertumbuhan Tingkat Inklusi Keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan dan tingkat penggunaan akun

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Dari gambar diatas dapat dinyatakan Inklusi keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan dan tingkat penggunaan akun terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, meskipun Indonesia telah melaksanakan berbagai program inklusi keuangan, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi dalam mencapai pemerataan akses layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tantangan besar adalah ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, ketidaktahuan akan produk dan layanan keuangan, serta infrastruktur yang belum memadai di daerah-daerah terpencil. Selain itu, terdapat pula kesenjangan yang cukup besar dalam hal literasi keuangan antara kelompok masyarakat di daerah perkotaan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, terutama di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera (Evi, 2023).

Untuk mengurangi kemiskinan, inklusi keuangan sangat penting, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Pulau Sumatera. Ada korelasi positif antara peningkatan inklusi keuangan dan kemiskinan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tran dan Le (2021), Omar dan Inaba (2020), dan Inoue

(2019). Meningkatnya akses keuangan dapat memberi orang miskin peluang untuk mendirikan usaha mikro dan mendapatkan pembiayaan yang diperlukan. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada sektor informal. Akses ke layanan keuangan juga memungkinkan orang untuk mendapatkan asuransi yang dapat melindungi mereka dari bahaya ekonomi yang tak terduga.

Meskipun inklusi keuangan memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, beberapa daerah di Indonesia, seperti Pulau Sumatera, masih menghadapi beberapa hambatan untuk melakukannya. Tantangan yang harus diatasi termasuk perbedaan akses keuangan di antara daerah, terutama di antara kota dan pedesaan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan. Oleh karena itu, analisis lebih lanjut tentang dampak inklusi keuangan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera, yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang beragam.

Selain inklusi keuangan, kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain, seperti inflasi. Inflasi yang tidak terkendali, karena masyarakat miskin memiliki daya beli yang terbatas, dapat menjadi ancaman besar bagi kesejahteraan mereka. Kelompok pendapatan rendah yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan dasar akan lebih terbebani jika harga barang dan jasa pokok naik. Oleh karena itu, salah satu faktor penting dalam upaya penurunan kemiskinan adalah stabilitas harga atau inflasi yang rendah dan terkendali. Dengan inflasi yang stabil, masyarakat miskin dapat merencanakan pengeluaran dan kebutuhan sehari-hari mereka tanpa kehilangan nilai riil dari pendapatannya.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi pada satu waktu tertentu, tetapi juga bersifat dinamis dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Salah satu faktor penting yang kerap diabaikan dalam analisis kemiskinan adalah pengaruh kemiskinan di masa lalu terhadap kondisi kemiskinan saat ini (Assel et al, 2022). Individu atau rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan pada tahun sebelumnya cenderung

menghadapi hambatan yang lebih besar untuk keluar dari kondisi tersebut, seperti keterbatasan akses pendidikan, minimnya peluang kerja layak, serta rendahnya akumulasi aset dan sumber daya produktif. Keadaan ini menciptakan suatu poverty trap atau jebakan kemiskinan, di mana kemiskinan cenderung bertahan lintas waktu dan bahkan bisa diwariskan antar generasi. Dengan demikian, untuk memahami dinamika kemiskinan secara utuh, perlu dianalisis bagaimana kondisi kemiskinan sebelumnya berkontribusi terhadap keberlanjutan atau perubahan tingkat kemiskinan pada periode berikutnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, seiring dengan penurunan kemiskinan di Indonesia, Inklusi keuangan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, beberapa provinsi di Sumatera masih mengalami kemiskinan yang cukup tinggi di bandingkan dengan angka nasional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana inklusi keuangan dapat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Pulau Sumatera. Periode yang digunakan adalah 2017 hingga 2023. Penelitian ini akan menggali pengaruh antara tingkat inklusi keuangan di masing-masing provinsi dengan angka kemiskinan yang ada, untuk mengetahui sejauh mana akses ke layanan keuangan berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian ini juga akan menggunakan variabel kontrol yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan, yaitu Inflasi (Hasbullah, dkk, 2022), (Iyer, 2024), (Amagir, 2022), (Behnezhad, 2021), (Blanchard, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses sektor keuangan akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, antara lain penelitian oleh Tran dan Le (2021), Omar dan Inaba (2020), serta Inoue (2019).

Sementara itu, di Indonesia pemerintah menganggap tingkat inklusi keuangan masih rendah sehingga pemerintah menggalakkan perkembangan sektor keuangan dengan berbagai cara dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan dan

ketimpangan. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah strategi meningkatkan inklusi keuangan dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Bahkan terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kampanye inklusi keuangan hanyalah merupakan strategi pemasaran dari sektor perbankan untuk lebih banyak mendapatkan keuntungan. Perluasan akses perbankan bagi masyarakat miskin dan pelosok dianggap sebagai strategi memperbesar *funding* sebagai penyerap dana masyarakat, sementara selanjutnya dana akan disalurkan ke masyarakat kota yang dianggap lebih layak menerima kredit (*bankable*) dibandingkan masyarakat pelosok dan miskin. Hal ini kemudian justru akan dapat semakin memperbesar ketimpangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat inklusi keuangan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2023?
2. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2023?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh inklusi keuangan pada tingkat kemiskinan di 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Namun secara spesifik tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat inklusi keuangan di pulau Sumatera pada tahun 2017-2023.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inklusi keuangan pada kemiskinan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2023.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi pada kemiskinan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai sumber referensi/literature dan bahan rekomendasi yang dapat menggambarkan bagaimana tingkat inklusi keuangan di Indonesia dan dapat mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan informasi akademis dan referensi untuk pengembangan kajian dan tambahan literasi khususnya di bidang ekonomi untuk lebih berkontribusi pada negara dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai bahan capaian kinerja institusi pendidikan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bentuk peningkatan level kompetensi, menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ekonomi yang dapat digunakan dan diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari serta untuk memperoleh gelar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Inklusi Keuangan

Bank Indonesia menyatakan bahwa adanya istilah keuangan inklusif (*financial inclusion*) mulai banyak dikenal setelah terjadinya krisis pada tahun 2008. Masa krisis saat itu cukup berpengaruh kepada kalangan Masyarakat bawah. Bagi mereka yang termasuk golongan Masyarakat bawah adalah mereka yang berpendapatan rendah dan tidak teratur, tempat tinggal yang berada di daerah terpencil, penyandang disabilitas, pekerja yang tidak tercatat secara legal, umumnya diperkerkirakan tidak layak oleh bank (*unbankable*) yang tercatat tinggi di negara-negara berkembang.

Para anggota G20 di acara Pittsburgh Summit 2009 menyatakan sepakat bahwa akses keuangan masyarakat golongan bawah ini perlu ditingkatkan. Kesepakatan tersebut dipertegas kembali pada acara Toronto Summit pada tahun 2010, melalui hasil berupa 9 Prinsip Inklusi Keuangan Inovatif sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif, meliputi kepemimpinan (*leadership*), inovasi (*innovation*), pemberdayaan (*empowerment*), keberagaman (*diversity*), perlindungan (*protection*), pengetahuan (*knowledge*), kerjasama (*cooperation*), proporsionalitas (*proposionality*), dan kerangka kerja (*framework*) (Bank Indonesia, 2014)

Sejak saat itu, banyak organisasi internasional mulai memfokuskan pada kegiatan keuangan inklusi seperti APEC, *World Bank*, IMF, *Asian Development Bank* (ADB), *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), dan sebagainya, termasuk juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Termasuk juga negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kata inklusi keuangan secara spesifik belum memiliki definisi yang baku. Ada beberapa definisi yang dicetuskan oleh lembaga peneliti yang berbeda namun memiliki substansi yang kurang lebih sama. Hasil penelitian Sharma pada tahun 2012 mendefinisikan inklusi keuangan sebagai suatu proses untuk memudahkan masyarakat di semua lapisan untuk mengakses lembaga keuangan formal, memiliki akses ke layanan dan lembaga keuangan, serta menggunakan lembaga keuangan formal. Penelitiannya menjadi salah satu sumber utama bagi para peneliti yang mengkaji inklusi keuangan. Murtadlo dan Sulhan (2023) menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan prasyarat bagi keterampilan pengambilan keputusan dan keterbatasan lembaga layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Inklusi keuangan, menurut Bank Dunia (2014), adalah persentase masyarakat dan bisnis yang menggunakan layanan keuangan. Menurut Bank Indonesia (2014), keuangan inklusif mengacu pada berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menghilangkan semua hambatan yang dihadapi masyarakat saat mencoba memperoleh layanan keuangan. Ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, barang, dan jasa keuangan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikenal dengan istilah inklusi keuangan, menurut Jasa Keuangan (2017).

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menyerukan setidaknya layanan keuangan digital untuk memperkuat integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, sehingga tercapai tujuan inklusi keuangan. Salah satu cara pendekatan tersebut—berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, setidaknya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta masyarakat lintas kelompok adalah penguatan keuangan inklusif yang dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi.

Untuk mengukur tingkat keuangan yang inklusif pada sebuah negara, dapat digunakan beberapa indikator. Yang pertama yaitu tingkat ketersediaan/akses pada

lembaga keuangan, untuk mengukur seberapa jauh jasa keuangan formal dapat terjangkau baik secara fisik maupun secara harga. Kedua tingkat penggunaan, untuk mengetahui bagaimana kemampuan penggunaan produk dan jasa keuangan secara aktual (antara lain keteraturan penggunaan, seberapa sering penggunaan dan lama waktu penggunaan). Indikator ketiga adalah tingkat kesejahteraan, yang menilai dampak layanan keuangan terhadap kehidupan pengguna, dan tingkat kualitas, yang mengevaluasi apakah keluasan produk dan layanan keuangan memenuhi kebutuhan konsumen.

Banyak penelitian yang membedakan antara konsep akses jasa keuangan dengan konsep penggunaan jasa keuangan. Jumlah rekening tabungan dan kredit mencerminkan penggunaan, sedangkan distribusi jaringan kantor perbankan dan ATM di suatu wilayah menandakan akses terhadap layanan keuangan (Bank Dunia, 2009). Sarma menggabungkan berbagai konsep menjadi satu teori baru yang disebut Indeks Inklusi Keuangan (*Index of Financial Inclusion*). Indeks ini mengukur tingkat inklusi keuangan suatu negara. Indeks Inklusi Keuangan (IIK), yang dikembangkan oleh Sarma (2012), menggunakan tiga dimensi: tingkat penetrasi perbankan (Aksesibilitas), ketersediaan layanan perbankan, dan pemanfaatan layanan perbankan, dengan layanan perbankan berfungsi sebagai proxy untuk semua layanan keuangan.

Peningkatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital merupakan salah satu cara untuk mewujudkan inklusi keuangan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peningkatan keuangan inklusif yang dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 4 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta berbagai kelompok demografi masyarakat.

Tingkat inklusi keuangan suatu negara dapat dievaluasi menggunakan berbagai metrik. Faktor pertama adalah tingkat aksesibilitas dan ketersediaan lembaga keuangan, yang menilai sejauh mana layanan keuangan formal terjangkau dan dapat diakses secara fisik. Aspek kedua adalah tingkat pemanfaatan, yang menilai keterlibatan aktual dengan produk dan layanan keuangan, yang meliputi frekuensi, keteraturan, dan durasi penggunaan. Aspek ketiga adalah tingkat kesejahteraan, yang menilai dampak layanan keuangan terhadap kehidupan pengguna, dan tingkat kualitas, yang mengevaluasi apakah keluasan produk dan layanan keuangan memenuhi kebutuhan konsumen.

Banyak penelitian yang membedakan antara gagasan tentang pemanfaatan layanan keuangan dan kepemilikan akses terhadap layanan tersebut. Volume rekening tabungan dan kredit mencerminkan penggunaan, sedangkan distribusi jaringan kantor perbankan dan ATM di suatu wilayah menandakan akses terhadap layanan keuangan (Bank Dunia, 2009). Sarma menggabungkan berbagai konsep menjadi satu teori baru yang disebut Indeks Inklusi Keuangan (Indeks Inklusi Keuangan). Indeks ini mengukur tingkat inklusi keuangan suatu negara. Indeks Inklusi Keuangan (IIK), yang dikembangkan oleh Sarma (2012), dihitung menggunakan tiga dimensi: tingkat penetrasi perbankan (*Aksesibilitas*), ketersediaan layanan perbankan (*Availibilitas*), dan pemanfaatan layanan perbankan, dengan layanan perbankan berfungsi sebagai proksi untuk semua layanan keuangan.

a. Penetrasi Perbankan (*Aksesibilitas*)

Tujuan dari sistem keuangan inklusif adalah untuk memaksimalkan partisipasi pengguna. Akibatnya, sistem keuangan dapat menjangkau populasi yang sangat besar. Rasio rekening bank terhadap populasi berfungsi sebagai indikator penetrasi perbankan, yang mencerminkan aksesibilitas layanan keuangan dalam masyarakat. Indikator utama yang digunakan untuk menilai inklusi keuangan adalah penetrasi perbankan.

b. Ketersediaan Jasa keuangan (*Availibilitas*)

Semua pengguna harus memiliki akses ke layanan keuangan dalam sistem keuangan yang inklusif. Jumlah outlet perbankan, termasuk jaringan cabang dan ATM, berfungsi sebagai tolok ukur penilaian. Outlet ini menyediakan layanan perbankan penting seperti menabung, menarik uang, mengajukan kredit, melakukan pembayaran, dan mengakses layanan keuangan lainnya, sehingga menggarisbawahi pentingnya outlet ini. Dengan kemajuan teknologi, banyak bank telah mengadopsi *mobile banking* dan *internet banking* untuk menyediakan akses ke layanan keuangan bagi nasabah di samping cabang konvensional.

c. Penggunaan Jasa Perbankan

Meskipun layanan keuangan mudah diakses, beberapa individu belum memanfaatkannya. Masalah keyakinan agama, jarak yang jauh dengan kantor bank atau pengalaman yang tidak menyenangkan dengan lembaga keuangan adalah beberapa alasan mendasar masyarakat belum memanfaatkan layanan jasa keuangan. Akibatnya, jumlah pemegang rekening tidak dapat memperlihatkan tingkat inklusi secara memadai. Dengan demikian, tingkat penggunaan juga harus dinilai. Seseorang yang memastikan tingkat pemanfaatan dengan menganalisis penerapan kredit, Tabungan, pembayaran, transfer uang, dan prosedur keuangan lainnya.

2.1.2 Inflasi

Inflasi mengacu pada peningkatan harga barang dan jasa secara berkelanjutan dalam perekonomian suatu negara selama jangka waktu tertentu. Penurunan daya beli mata uang terwujud dalam inflasi, yang dapat memengaruhi kebijakan moneter dan pengeluaran konsumen (Mishkin, 2020). Indeks harga konsumen (IHK), yang memantau fluktuasi harga barang dan jasa yang umumnya diperoleh konsumen, umumnya digunakan untuk mengukur inflasi (BPS, 2023).

Menurut Blanchard dan Johnson (2021), inflasi dapat timbul karena beberapa faktor, antara lain: peningkatan permintaan agregat yang melebihi kapasitas produksi, peningkatan biaya produksi, atau perubahan ekspektasi inflasi yang mempengaruhi keputusan ekonomi. Di sisi lain, deflasi adalah kebalikan dari

inflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum, yang sering kali dihubungkan dengan kontraksi ekonomi atau resesi (Mishkin, 2020). Terdapat beberapa jenis inflasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Inflasi Tuntutan (*Demand-Pull Inflation*)

Inflasi ini terjadi ketika permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian lebih besar daripada kapasitas produksi yang tersedia. Peningkatan pengeluaran oleh konsumen, pemerintah, dan perusahaan dapat menyebabkan tekanan pada harga barang dan jasa (Blanchard & Johnson, 2021).

2. Inflasi Biaya (*Cost-Push Inflation*)

Inflasi ini muncul ketika biaya produksi barang dan jasa meningkat, misalnya akibat kenaikan harga bahan baku atau upah tenaga kerja. Peningkatan biaya produksi ini kemudian diteruskan pada konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi (Mishkin, 2020).

3. Inflasi Tertahan (*Built-In Inflation*)

Inflasi ini sering terjadi akibat ekspektasi inflasi yang telah melekat pada perekonomian. Pekerja menuntut kenaikan gaji untuk mengimbangi inflasi yang terus meningkat, sementara produsen menaikkan harga untuk menutupi biaya yang lebih tinggi, menciptakan siklus inflasi yang berulang (Blanchard & Johnson, 2021).

Inflasi memiliki berbagai dampak terhadap perekonomian, yang dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada tingkat dan laju inflasi itu sendiri. Berikut merupakan beberapa dampak inflasi.

1. Dampak Positif Inflasi

Inflasi yang moderat dapat merangsang konsumsi dan investasi, karena orang cenderung untuk membeli barang sebelum harga naik lebih tinggi di masa depan (Mishkin, 2020). Inflasi juga dapat mengurangi beban utang nominal, sehingga memberikan kelegaan bagi debitur yang meminjam uang dengan bunga tetap.

2. Dampak Negatif Inflasi

Inflasi yang terlalu tinggi dapat mengganggu kestabilan ekonomi. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan keuangan, menurunkan daya beli masyarakat, dan merugikan mereka yang memiliki pendapatan tetap. Inflasi juga dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada gilirannya dapat

mengurangi daya saing internasional (BPS, 2023). Dalam jangka panjang, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat berpotensi menyebabkan stagflasi, yaitu kombinasi antara inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan (Blanchard & Johnson, 2021).

Inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang mencatat perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang biasa dibeli oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang ini dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti pangan, perumahan, transportasi, dan pendidikan (BPS, 2023). IHK memberikan gambaran umum mengenai daya beli konsumen dan perubahan biaya hidup mereka. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, inflasi dapat diukur dalam beberapa cara berdasarkan periode waktu tertentu, antara lain:

1. **Inflasi YoY (*Year-on-Year*)**

Inflasi YoY adalah perbandingan tingkat inflasi antara bulan atau kuartal yang sedang berlangsung dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Inflasi YoY sering digunakan untuk menggambarkan tren inflasi dalam jangka panjang dan memberikan gambaran lebih jelas tentang dampak tahunan terhadap perekonomian (Mishkin, 2020). Misalnya, inflasi YoY untuk bulan Januari 2023 akan dibandingkan dengan harga pada Januari 2022. Formula untuk menghitung inflasi YoY:

$$\text{Inflasi}_{YoY} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

2. **Inflasi MTM (*Month-to-Month*)**

Inflasi MTM mengukur perubahan harga dari satu bulan ke bulan berikutnya. Inflasi jenis ini lebih bersifat jangka pendek dan sering digunakan untuk memahami fluktuasi harga yang terjadi dalam periode bulanan (Mishkin, 2020). Inflasi MTM membantu dalam mengidentifikasi gejolak harga jangka pendek atau kejadian luar biasa yang mempengaruhi pasar. Formula untuk menghitung inflasi MTM:

$$Inflasi_{mtm} = \frac{IHK_m - IHK_{m-1}}{IHK_{m-1}} \times 100$$

3. Inflasi YTD (*Year-to-Date*)

Inflasi YTD mengukur perubahan harga sejak awal tahun hingga bulan yang sedang dihitung. Inflasi ini menggabungkan data bulan-bulan sebelumnya dalam tahun yang sama, sehingga memberikan gambaran lebih holistik tentang tren inflasi sepanjang tahun (Mishkin, 2020). Inflasi YTD sering digunakan oleh para analis ekonomi untuk memproyeksikan inflasi di akhir tahun. Formula untuk menghitung inflasi YTD:

$$Inflasi_{YTD} = \frac{IHK_{Bulan\ x, Tahun\ T} - IHK_{Januari, Tahun\ T}}{IHK_{Januari, Tahun\ T}} \times 100$$

2.1.3 Kemiskinan

2.1.7.1. Definisi Kemiskinan

Dalam *Handbook on Poverty and Inequality* (Haughton dan Khandker, 2009) yang diterbitkan oleh The World Bank, Bank Dunia menyatakan bahwa kapasitas untuk memperoleh kesehatan merupakan penentu kemiskinan. Kemiskinan, menurut peraih Nobel Amartya Sen dari bidang ekonomi kesejahteraan, dapat disebabkan karena kurangnya keterampilan penting, seperti kurangnya pendidikan, pendapatan, kesehatan, kepercayaan diri, rasa tidak berdaya, ketakutan, ketidakamanan, ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui, atau kesehatan yang buruk, antara lain. Menurut perspektif ini, kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu solusi karena merupakan fenomena yang memiliki banyak aspek.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pada sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tidak hanya makanan. Untuk mengetahuinya, kita harus melihat dari

perspektif biaya. Oleh karena itu, orang dianggap miskin jika pengeluaran bulanan rata-rata tiap kepala atau per kapita mereka berada di bawah batas garis kemiskinan. Menurut Bureau of Population and Social (BPS), garis kemiskinan (GK) adalah batas di mana seseorang dapat dianggap miskin berdasarkan standar suatu negara pada tingkat perkembangan ekonomi tertentu.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM) adalah dua kategori GK. GKM adalah jumlah uang yang dihabiskan oleh setiap orang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan makanan minimum mereka, yang setara dengan 2.100 kilokalori per hari. Dalam perhitungan, 52 jenis komoditi termasuk daging, umbi-umbian, padi, ikan, susu, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum dalam hal perumahan (rumah), pakaian dan pendidikan, dan kesehatan. Untuk kebutuhan dasar non-makanan ini, ada 51 jenis komoditi untuk kota dan 47 jenis komoditi untuk pedesaan. Oleh karena itu GK adalah jumlah GKM ditambah GKNM. Selanjutnya, orang dimasukkan dalam kategori miskin jika pengeluaran perkapitanya rata-rata mereka di bawah GK setiap bulan.

UNDP menggambarkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk melakukan upaya untuk memperluas berbagai opsi hidup. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik dinilai dan dimasukkan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Chriswardani (2005) mengatakan bahwa ada banyak cara untuk mendefinisikan kemiskinan, seperti:

a. Kemiskinan absolut adalah jenis kemiskinan di mana seseorang hanya mampu memenuhi kebutuhan paling mendasar dengan uang yang dimilikinya. Untuk menentukan apakah seseorang hidup dalam kemiskinan absolut, seseorang harus membandingkan pendapatannya dengan jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

B. Kemiskinan dalam kaitannya dengan orang lain: Bentuk kemiskinan ini dilihat melalui sudut pandang ketimpangan sosial. Status seseorang tetap jauh lebih

rendah dibandingkan dengan orang lain di sekitar atau lingkungannya, meskipun mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum mereka. Semakin lebar kesenjangan antara segmen masyarakat terkaya dan termiskin, semakin banyak individu yang dianggap miskin. Hal ini dapat terjadi dalam sistem budaya atau sosial yang tidak ingin kemiskinan berkurang atau secara aktif berupaya memperburuknya.

2.1.7.2. Determinan Kemiskinan

Determinan kemiskinan dapat dilihat berdasarkan berbagai tingkat, seperti kemiskinan dalam suatu negara, masyarakat, rumah tangga, atau individu. Menurut Haughton dan Khandker (2009), tingkat kemiskinan dalam level negara sangat spesifik dan bergantung pada ciri-ciri negara tersebut. Secara umum, kondisi geografis suatu negara dapat memengaruhi kemiskinan, seperti sumber daya alam yang terbatas, curah hujan yang rendah, dan wilayah yang terisolasi. Tata kelola pemerintahan, kebijakan lingkungan, stabilitas ekonomi-politik, keamanan, penegakan hukum, dan faktor lainnya merupakan faktor penting selain kondisi geografis.

Kemiskinan di tingkat masyarakat di suatu daerah regional didasarkan pada tingkat kemiskinan rumah tangga dalam masyarakat tersebut. Pada tingkat ini, kondisi infrastruktur merupakan komponen penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Pembangunan jalan raya, ketersediaan listrik, ketersediaan sekolah dan rumah sakit, serta tingkat pembangunan sumber daya manusia, akses lapangan pekerjaan, dan distribusi lahan adalah beberapa indikator pembangunan infrastruktur, dan yang paling penting adalah jaringan modal sosial yang menciptakan kepercayaan di antara masyarakat.

Faktor penentu demografi, ekonomi, dan sosial diklasifikasikan ke dalam tiga kategori menurut ciri-ciri di tingkat rumah tangga dan individu, yang semuanya berdampak pada kemiskinan. Indikator penting hubungan antara kemiskinan dan demografi rumah tangga meliputi ukuran rumah tangga dan struktur demografi

(misalnya, jenis kelamin dan usia). Pertimbangan yang lebih bersifat ekonomi meliputi hal-hal seperti pendapatan, konsumsi, dan status pekerjaan.

Beberapa faktor menyebabkan kemiskinan, menurut Nasikun dalam Chriswardani (2005):

- a. *Policy induces processes*: suatu proses pemiskinan yang dilestarikan dan direplikasi melalui penerapan kebijakan (induced of policy). Misalnya, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tetapi pada akhirnya dapat memperparah kemiskinan.
- b. *Socio-econimic dualism* : pola produksi yang diwariskan dari masa penjajahan dapat menyebabkan kemiskinan negara-negara yang pernah dijajah, seperti Indonesia. Petani terpinggirkan karena petani skala besar yang berorientasi untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya menguasai lahan dengan kualitas terbaik.
- c. *Population growth* : Teori Malthus menyatakan bahwa ada perbedaan antara pertumbuhan pangan dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk tumbuh sesuai dengan deret ukur, sedangkan jumlah pangan tumbuh sesuai dengan deret hitung. Hal ini berarti produksi pangan tidak akan pernah dapat mencukupi untuk seluruh populasi.
- d. *Recources management and the environment* : yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, seperti proses manajemen pertanian yang tidak memperhitungkan keberlanjutan dan produktivitas tanaman pertanian.
- e. *Natural cycles and processes* : Ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh siklus alam. Misalnya, orang yang tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor Hal ini menghasilkan hasil yang buruk bagi pekerja.
- f. *The marginalization of woman* : Diskriminasi terhadap perempuan karena dianggap sebagai kelompok yang lebih lemah daripada laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors* : yang menciptakan dan melestarikan kemiskinan Contohnya adalah gaya hidup konsumtif dan pemborosan yang dilakukan oleh petani dan nelayan selama panen raya, serta gaya hidup konsumtif yang berlebihan selama upacara adat atau upacara keagamaan.

- h. *Exploitative intermediation* : keberadaan pihak yang tampaknya membantu tetapi sebenarnya merugikan, seperti lintah darat atau rentenir di masyarakat.
- i. *Internal political fragmentation and civil conflict* : penerapan kebijakan di suatu daerah yang memiliki fragmentasi politik yang kuat menyebabkan keadaan yang tidak kondusif dan kemiskinan.
- j. *International processes* : berlakunya sistem internasional yang tidak memihak kepada golongan miskin, seperti kolonialisme dan kapitalisme.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat penyebab kemiskinan lain di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang disebabkan oleh keterbatasan kepemilikan aset, yaitu:

- a. *Natural assets*: misalnya yaitu tanah dan air. Sebagian besar masyarakat pedesaan hanya menguasai lahan terbatas yang kurang memadai untuk mendukung produktifitas kerjanya.
- b. *Human assets*: yaitu menyangkut kualitas sumber daya manusia pedesaan yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan (misalnya dalam hal pendidikan, keterampilan, penguasaan teknologi, maupun tingkat kesehatan).
- c. *Physical assets*: yaitu minimnya akses terhadap infrastruktur dan akses fasilitas umum seperti jaringan listrik, jalan raya, dan sarana komunikasi di wilayah pedesaan.
- d. *Financial assets*: yaitu berupa tabungan (*saving*) serta akses dalam memperoleh pendanaan atau modal usaha.
- e. *Social assets*: yaitu berupa koneksi, jaringan, dan pengaruh politik. Misalnya kemampuan posisi tawar dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis.

2.1.7.3. Pengukuran Kemiskinan

Terdapat beberapa cara untuk mengetahui tingkat kemiskinan. Antara lain dengan menggunakan *Headcount Index (P₀)*, *Poverty Gap Index (P₁)*, dan *Poverty Severity Index (P₂)*. *Headcount index* merupakan metode yang sederhana untuk dilakukan dan mudah dimengerti, yakni dengan menghitung persentase jumlah penduduk

di bawah garis kemiskinan dari total populasi penduduk. *Headcount Index* (P_0) dirumuskan sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

Poverty Gap Index (P_1) adalah indeks untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan di suatu wilayah terhadap garis kemiskinan. Menurut BPS, *Poverty Gap Index* (Index Kedalaman Kemiskinan) merupakan ukuran rata-rata ketimpangan pengeluaran setiap kepala penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sehingga dalam indeks ini apabila nilainya semakin tinggi, maka semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Rumus *Poverty Gap Index* sebagai berikut:

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^1$$

Selanjutnya, *Poverty Severity Index* (P_2) atau Indeks Keparahan Kemiskinan menggambarkan tingkat distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin. Sehingga, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. *Poverty Severity Index* dirumuskan sebagai berikut:

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

2.1.4 Inklusi keuangan dan kemiskinan

Ada lima cara di mana sistem keuangan suatu negara dapat dipengaruhi oleh pengembangan sektor keuangan (termasuk inklusi keuangan), sebagaimana dinyatakan oleh Levine (2004)

1. Menghasilkan informasi tentang tabungan/investasi untuk pengalokasian modal Sektor keuangan yang terbangun dengan baik akan menghasilkan informasi tepat tentang perusahaan yang akan dibiayai dan kondisi pasar, sehingga memudahkan investor untuk menentukan penyaluran dananya dengan lebih tepat dan cepat.
2. Meningkatkan pemantauan investasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan Sektor keuangan yang terbangun dengan baik akan mengatasi “*agency problem*” sehingga dana yang disalurkan pada debitur dapat tetap terpantau dengan sistem yang baik. Dengan demikian hal ini akan menciptakan keamanan investasi.
3. Memfasilitasi perdagangan, diversifikasi, dan manajemen risiko
Dengan terciptanya sistem keuangan yang baik, maka risiko yang mungkin timbul pada proses perdagangan dan diversifikasi investasi dapat dimitigasi dengan baik. Dengan demikian, akan meningkatkan likuiditas di masyarakat, mengurangi risiko, meningkatkan investasi jangka panjang, dan menghasilkan *return* yang lebih tinggi.
4. Memobilisasi dan mengumpulkan tabungan
Pengumpulan tabungan merupakan proses penghimpunan modal dari berbagai sumber yang memerlukan biaya yang besar. Dengan terciptanya sistem moneter yang canggih, ini akan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan pengumpulan uang.
5. Memfasilitasi pertukaran barang dan jasa
Melalui penyediaan mekanisme pembayaran secara fisik dan pengurangan biaya transaksi dan komunikasi, sistem keuangan dapat memungkinkan transaksi ekonomi. Hasilnya, inovasi di sektor keuangan akan menurunkan biaya informasi dan transaksi perdagangan, meningkatkan spesialisasi, dan memperlancar arus barang dan jasa lintas batas. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan didorong dengan membuat transaksi perdagangan komoditas dan jasa menjadi lebih mudah.

Lebih jauh lagi, sektor keuangan yang berkembang dengan baik akan mampu memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui dua

cara, yaitu secara tidak langsung (melalui pertumbuhan ekonomi) dan secara langsung.

2.1.7.1. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan pendapatan, penghematan uang, investasi lebih banyak, dan pengembangan teknologi baru merupakan cara agar sistem keuangan yang stabil dapat meningkatkan perekonomian (Zhuang dkk., 2009). Penurunan tingkat kemiskinan akan menjadi dampak tidak langsung dari ekspansi ekonomi ini.

Terdapat beberapa saluran bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan (Zhuang dkk., 2009) yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan munculnya lapangan kerja baru dan kesempatan yang lebih banyak bagi kelompok miskin.
2. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar buruh yang terampil (*skilled*) dengan yang tidak terampil (*unskilled*). Hal ini menguntungkan bagi kelompok miskin yang umumnya *unskilled labor*.
3. Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Pemerintah kemudian dapat menggunakan uang tambahan tersebut untuk meningkatkan kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah melalui program-program seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Ditambah lagi, masyarakat berpenghasilan rendah akan memiliki lebih banyak uang untuk disalurkan ke sumber daya manusia (*human capital*).
4. Masyarakat miskin akan mampu menginvestasikan lebih banyak pendapatannya berkat akumulasi modal yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

2.1.7.2. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Secara langsung

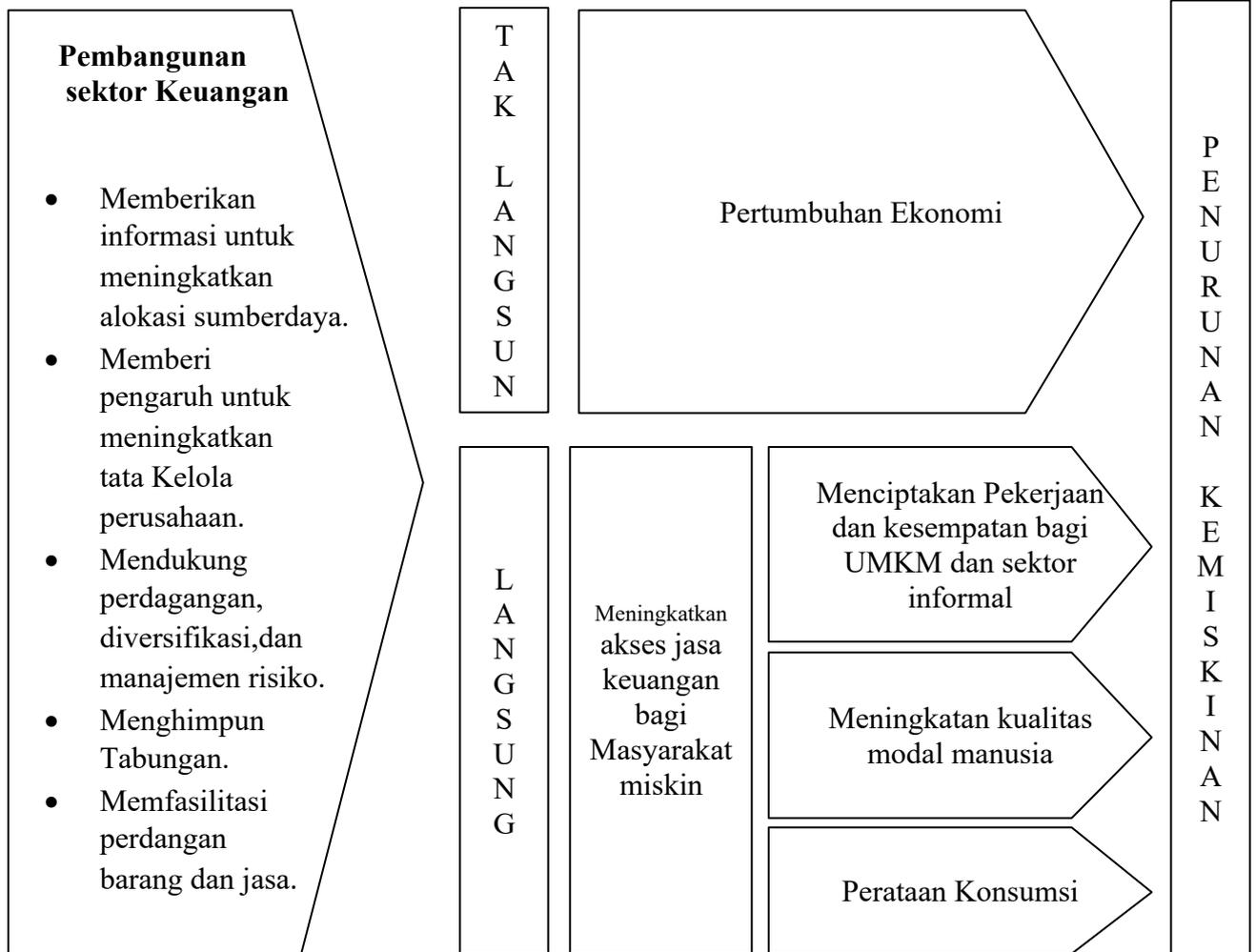
Selama ini, layanan keuangan formal sulit diperoleh oleh masyarakat miskin. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tantangan tersendiri ketika mencoba memperoleh pinjaman bank dan modal awal karena asimetri informasi, yang membuat mereka semakin sulit memperoleh keduanya (Zhuang dkk., 2009).

Perluasan akses ke layanan keuangan merupakan kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Mengurangi biaya informasi dan biaya transaksi yang terkait dengan inklusi keuangan akan memudahkan masyarakat miskin untuk menerima layanan keuangan. Masyarakat miskin dapat meningkatkan standar hidup dan pendapatan mereka dengan akses ke modal (Greenwood dan Jovanovic 1990). Selain menurunkan kemiskinan melalui penyediaan dana darurat dan pemerataan konsumsi (*consumption smoothing*), perluasan sektor keuangan akan meningkatkan modal manusia (sumber daya manusia) melalui pendidikan yang lebih baik.

Sarma (2012) menyatakan bahwa ada tiga cara untuk mengukur inklusi keuangan, yaitu penetrasi perbankan (aksesibilitas), ketersediaan layanan perbankan (ketersediaan), dan kemudahan penggunaan layanan perbankan. Sebagai cerminan penetrasi perbankan masyarakat, komponen aksesibilitas mengukur jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap lembaga layanan keuangan formal. Dengan semakin kuatnya sistem keuangan, masyarakat miskin di negara berkembang akan semakin mudah mengakses lembaga keuangan, yang akan membantu mereka meningkatkan pendapatan. Upaya untuk membuat layanan ini lebih mudah diakses antara lain dengan menghilangkan hambatan dalam penggunaannya, seperti memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat berpendapatan rendah tentang layanan ini karena mereka kurang mengenal lembaga keuangan tradisional. Upaya juga telah dilakukan untuk menyederhanakan proses perbankan dan pembatasan kredit, menurunkan potensi biaya, dan menyediakan layanan atau produk yang khusus untuk kebutuhan kelompok berpenghasilan rendah ini.

Sejumlah saluran akan mengalami peningkatan ketersediaan akses sebagai hasil dari peningkatan dimensi ketersediaan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memanfaatkan teknologi secara lebih luas dan membuka cabang penyedia layanan keuangan atau mengirim perwakilan dari lembaga keuangan ke tempat-tempat di mana masyarakat berpenghasilan rendah tinggal, seperti daerah pedesaan. Lembaga layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat yang kurang terlayani sebagai hasil dari perluasan dan diversifikasi mereka. Sementara itu, peningkatan dimensi pemanfaatan menunjukkan bahwa lebih banyak kredit yang disalurkan ke masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah, yang menunjukkan bahwa pendapatan mereka meningkat.

Berdasarkan informasi yang diberikan, kita dapat merumuskan konsep tentang bagaimana pengembangan sektor keuangan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam dua cara, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut oleh Zhuang et al. (2009):

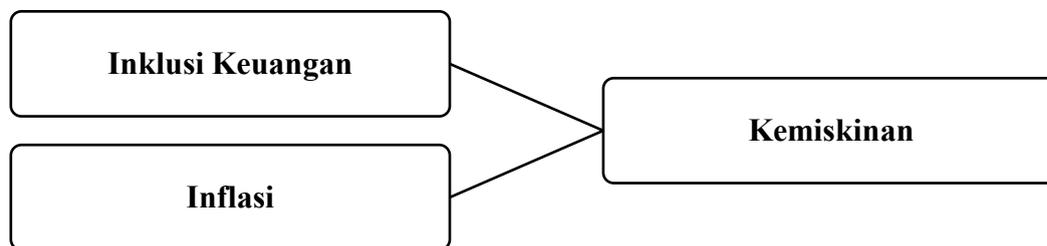


Gambar 2. 1 Pengaruh Pembangunan Keuangan Pada Kemiskinan

2.2 Kerangka Konseptual

Inklusi keuangan dapat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan, terutama dalam memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal. Koomson et al. (2020) menemukan bahwa inklusi keuangan berhubungan dengan penurunan kemungkinan rumah tangga menjadi miskin dan mengurangi paparan terhadap kemiskinan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas, masyarakat dapat lebih mudah mengelola konsumsi dan aktifitas produktif mereka, yang pada gilirannya mengurangi kerentanannya terhadap kemiskinan. Selain itu, studi oleh Inoue (2018) juga menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara inklusi keuangan dan rasio kemiskinan di India, yang mengindikasikan bahwa akses ke layanan keuangan yang lebih baik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya terbatas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Inflasi dapat memperburuk kondisi kemiskinan, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Fadlan dan Lubis (2023) menemukan bahwa inflasi yang tinggi di Kota Medan meningkatkan tingkat kemiskinan karena kenaikan harga mengurangi daya beli masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kelompok miskin. Inflasi mengurangi nilai riil pendapatan, sehingga mengurangi konsumsi dan kualitas hidup masyarakat miskin. Hal ini juga disarankan oleh Easterly dan Fischer (2001), yang menunjukkan bahwa inflasi berdampak lebih buruk pada kelompok miskin, yang tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri dari dampak inflasi. Ketika inflasi meningkat, kemiskinan juga cenderung meningkat, karena masyarakat dengan pendapatan terbatas tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan

Beberapa penelitian melihat dampak inklusi keuangan terhadap kemiskinan. Koomson dkk (2020) mengkaji pengaruh inklusi keuangan terhadap kemiskinan dan kerentanannya di rumah tangga Ghana. Menggunakan data yang diambil dari Putaran Ketujuh Survei Standar Hidup Ghana pada 2016-2017, analisis korespondensi berganda digunakan untuk menghasilkan indeks inklusi keuangan, dan metode kuadrat terkecil tiga tahap digunakan untuk memperkirakan kerentanannya terhadap kemiskinan pada rumah tangga. Endogenitas yang terkait dengan inklusi keuangan diselesaikan dengan menggunakan jarak ke bank terdekat sebagai instrumen dalam teknik probit variabel instrumental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 23,4% orang Ghana dianggap miskin, sekitar 51% rentan terhadap kemiskinan. Kami menemukan bahwa peningkatan inklusi keuangan memiliki dua dampak pada kemiskinan rumah tangga. Pertama, ini terkait dengan penurunan kemungkinan rumah tangga menjadi miskin sebesar 27%. Kedua, ini mencegah paparan rumah tangga terhadap kemiskinan di masa depan sebesar 28%.

Inoue (2018) melakukan penelitian mengenai dampak inklusi keuangan terhadap penurunan kemiskinan di India. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dari tahun 1973 sampai 2004 dengan metode *generalized method of moments*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan pendalaman keuangan memiliki hubungan negatif yang signifikan secara statistik dengan rasio kemiskinan untuk bank sektor publik, namun tidak untuk bank sektor swasta.

Semakin banyak orang yang memiliki akses ke layanan keuangan untuk membantu kegiatan konsumsi dan produksi maka tingkat kemiskinan yang lebih rendah, kata Park dan Mercado (2015). Korelasi kecil antara inklusi keuangan dan kesenjangan pendapatan juga ditemukan di negara-negara berkembang di Asia, menurut penelitian tersebut.

Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pengembangan keuangan gagal mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Sementara perluasan perbankan dan pasar modal dapat meningkatkan ekonomi negara berkembang, Seven dan Coskun (2016) menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak memperoleh banyak manfaat dari hal ini dan tidak memberikan kontribusi apa pun untuk mengurangi kemiskinan.

Perkembangan keuangan yang pesat, yang erat kaitannya dengan liberalisasi keuangan, tanpa lembaga politik dan ekonomi yang kuat serta kurangnya regulasi dan pengawasan yang bijaksana dapat menyebabkan krisis keuangan dan ekonomi. Krisis ini dapat memengaruhi tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan riil, yang dapat menyebabkan penurunan kemiskinan (Seven dan Coskun, 2016).

Menurut Guillaumont Jeanneney dan Kpodar (2008), ketidakstabilan sektor keuangan akibat krisis dapat mengurangi atau menghilangkan efek positif pengembangan keuangan terhadap pengurangan kemiskinan.

H₁: Inklusi keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

2.3.2 Bagaimana Inflasi Mempengaruhi Kemiskinan

Inflasi didefinisikan oleh Boediono (1999) sebagai kecenderungan umum dan terus-menerus dari kenaikan harga. Secara umum, inflasi tidak mencakup situasi di mana harga-harga naik untuk beberapa barang. Ketika kenaikan harga berdampak luas atau menyebabkan harga barang-barang lain naik secara keseluruhan, kita katakan bahwa telah terjadi inflasi. Itulah sebabnya inflasi dianggap sebagai salah satu metrik utama untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan.

Ada dua kemungkinan penjelasan untuk korelasi antara kemiskinan dan inflasi. Salah satunya adalah daya beli uang telah berkurang karena inflasi. Daya beli mata uang menurun akibat kenaikan harga. Cara kedua adalah daya beli berkurang karena inflasi menurunkan nilai bunga yang diperoleh dari tabungan bank. Orang-orang menjadi lebih miskin daripada sebelumnya karena daya beli mereka menurun.

Easterly dan Fischer (2001) menyatakan bahwa orang miskin lebih terpengaruh oleh inflasi dibandingkan orang kaya. Orang kaya lebih siap menghadapi inflasi, dan beberapa bahkan mungkin menyambutnya sebagai sarana untuk meraup keuntungan dari suku bunga yang lebih tinggi pada instrumen keuangan. Jadi, inflasi dapat memperburuk keadaan bagi orang miskin dan menyebabkan lebih banyak orang hidup dalam kemiskinan, sehingga memperlebar jurang antara orang kaya dan masyarakat lainnya.

Fadlan dan Lubis (2023) meneliti dampak inflasi terhadap kemiskinan yang terjadi di Kota Medan pada tahun 2008-2020. Penelitian ini menggunakan metode CFA (*Confirmatory Factor Analysis*) dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Medan. Kenaikan harga konsumen (inflasi) dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan. Sebaliknya, inflasi yang rendah akan mengurangi tingkat kemiskinan. Ini berarti bahwa jika inflasi naik, kemiskinan juga akan meningkat karena inflasi, yang ditandai dengan kenaikan harga, akan menyebabkan orang yang mengalami kemiskinan mengurangi tingkat konsumsi

mereka karena nilai uang yang mereka miliki (pendapatan riil) juga semakin kecil, sehingga mengurangi tingkat konsumsi mereka dan menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat. Ketika tingkat inflasi melonjak dan nilai mata uang riil berfluktuasi sangat tinggi, inflasi yang meningkat pada gilirannya akan diikuti dengan peningkatan batas garis kemiskinan sebagai akibat dari kenaikan tingkat inflasi, yang akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin jika tidak diikuti dengan peningkatan daya beli atau kenaikan pendapatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Bagi sebagian besar orang, mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu konsisten berada dalam kelompok yang mengalami kemiskinan.

Iyer (2024) meneliti masalah inflasi dan kemiskinan yang terjadi di empat negara BRIC. Negara-negara BRIC yang diteliti meliputi Brasil, Rusia, India, dan China. Penelitian ini menggunakan regresi deret waktu dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi cenderung memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan tingkat kemiskinan.

H₂ : Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang disusun secara terstruktur dengan menghubungkan berbagai komponen, fenomena, dan hubungan yang ada dalam objek penelitian. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan sebuah model matematis dengan mengintegrasikan teori-teori yang relevan, penelitian sebelumnya, serta hipotesis yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Dalam pendekatan kuantitatif, data yang digunakan berbentuk angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Penelitian ini menggunakan data panel, yang mencakup informasi dari 10 provinsi di Sumatera selama periode 2017 hingga 2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan dilakukan perhitungan indeks inklusi keuangan untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan di Pulau Sumatera. Kemudian, indeks inklusi keuangan dimasukkan dalam perhitungan untuk dapat mengetahui faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan pada 10 Provinsi Pulau Sumatera periode 2017-2023.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari pihak lain, atau tidak secara langsung dari subjek penelitiannya. Jenis data sekunder pada umumnya merupakan data yang berbentuk dokumentasi atau berbentuk data laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari permintaan data kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *website* Bank Indonesia, dan *website* Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut merupakan data menurut 10 provinsi di Sumatera selama periode 2017-2023 meliputi data perbankan, demografi, perdagangan, kemiskinan, dan ketimpangan.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen dan 7 variabel independen, adapun pengukuran setiap variabel dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel Penelitian

Notasi	Variabel	Definisi Variabel	Sumber
Pov	Tingkat Kemiskinan	Persentase jumlah penduduk miskin (%)	Badan Pusat Statistik (BPS)
Pov (t-1)	Tingkat Kemiskinan satu tahun sebelumnya	Persentase jumlah penduduk miskin (%) satu tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik (BPS)
IIK	Indeks Inklusi Keuangan	Indeks yang mempertimbangkan tiga dimensi inklusi keuangan, yaitu Aksesibilitas, Availibilitas, dan Penggunaan	Badan Pusat Statistik (BPS)
Inflasi	Inflasi	Tingkat perubahan Indeks Harga Konsumen Tahunan (yoy). Inflasi dinyatakan dalam persentase.	Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks Inklusi Keuangan 10 provinsi di Pulau Sumatera diukur dengan metode yang dilakukan oleh Sarma (2015), dengan menggunakan tiga dimensi yang menjadi indikator Inklusi Keuangan (IIK) sebagai berikut:

i. Aksesibilitas

Untuk mengukur tingkat penetrasi perbankan masing-masing provinsi pada tahun ke t , dihitung jumlah akun rekening tabungan bank per 1.000 penduduk dewasa (>15 tahun)

$$A_1 = \frac{\text{Jumlah akun rekening tabungan Bank (tahun } t)}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa tahun } t} \times 1.000$$

ii. Availibilitas

Untuk mengukur ketersediaan jasa perbankan masing-masing provinsi pada tahun ke t , dihitung jumlah outlet bank memperhitungkan rata-rata tertimbang (*wighted average*) $2/3$ untuk jaringan kantor dan $1/3$ untuk ATM per 100.000 penduduk dewasa dengan rumus:

$$A_2 = \frac{\left(\text{Jumlah Kantor} \times \frac{2}{3}\right)_t + \left(\text{Jumlah ATM} \times \frac{1}{3}\right)_t}{\text{Jumlah Penduduk Dewasa tahun } t} \times 100.000$$

iii. Penggunaan Jasa Perbankan

Untuk mengukur penggunaan jasa perbankan masing-masing provinsi pada tahun ke t , dihitung jumlah nominal kredit dan tabungan yang disalurkan bank umum konvensional di setiap provinsi dibagi dengan PDRB provinsi tersebut. dengan rumus:

$$A_3 = \frac{\text{Jumlah kredit disalurkan (tahun } t) + \text{Dana pihak ketiga (tahun } t)}{\text{PDRB (tahun } t)}$$

Dengan mengetahui nilai masing-masing dimensi, seseorang dapat menghitung indeks inklusi keuangan. Kinerja suatu daerah dalam dimensi tertentu berbanding lurus dengan indeksnya dalam rumus persamaan tersebut, di mana nilai yang lebih besar menunjukkan kinerja yang lebih baik. Misalnya, jika suatu provinsi memiliki indeks yang tinggi pada dimensi 'ketersediaan', itu berarti masyarakat di provinsi tersebut memiliki akses ke sejumlah besar layanan perbankan.

Menurut pendekatan perhitungan IFI Sarma (2015), semua dimensi memiliki batas bawah yang ditetapkan sebesar 0, dan batas atas dihitung menggunakan persentil ke-90 dari nilai setiap dimensi. Mengapa persentil ke-90 digunakan sebagai ganti nilai tertinggi di setiap dimensi saat menentukan batas? Karena jika data nilai tertinggi merupakan outlier, data lain dari provinsi harus berhadapan dengan nilai acuan yang terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan bias dalam skala nilai. Selain itu, batas atas digunakan sama dengan nilai dimensi provinsi mana pun yang nilainya lebih tinggi dari itu.

Dengan sistem keuangan yang inklusif, ketiga dimensi tersebut dapat diberi bobot yang sama, yaitu 1 karena semuanya sama-sama signifikan. Namun, menurut Sarma (2015), data tentang indikator penting yang secara tepat mencirikan dimensi ketersediaan dan penggunaan masih kurang, sehingga hanya dapat dihitung sebagian.

Misalnya, bank konvensional mengalami penurunan bisnis akibat maraknya perbankan daring dan telepon. Akibatnya, ketersediaan layanan perbankan tidak dapat sepenuhnya diukur hanya dengan mengandalkan data yang dihitung dari lokasi fisik, seperti jaringan kantor dan ATM. Sulit juga untuk menghitung layanan perbankan lainnya seperti pembayaran, transfer, dan pengiriman uang karena data yang tidak memadai, dan data tentang simpanan dan kredit hanya dapat menjelaskan sebagian dari penggunaan sistem keuangan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan bobot yang relatif lebih sedikit terhadap kedua dimensi terakhir ini. Dengan demikian,

dalam indeks ini, bobot untuk dimensi penetrasi perbankan (aksesibilitas) adalah 1 sedangkan bobot untuk dimensi avaiibilitas dan dimensi penggunaan masing-masing adalah 0,5.

3.3.2 Analisis Deskriptif

Pendekatan analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di Pulau Sumatera, khususnya terkait IIK yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Melalui analisis deskriptif, data yang dikumpulkan disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang IIK dan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. Selain itu, untuk mempermudah pemahaman distribusi dan pola data, penelitian ini memanfaatkan diagram batang dan peta tematik yang disusun berdasarkan metode natural breaks. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan, dengan membagi data ke dalam kelas-kelas yang memiliki kesamaan karakteristik secara alami. Peta tematik dengan natural breaks membantu visualisasi distribusi tingkat kemiskinan dan IIK di berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Teknik natural breaks memisahkan data berdasarkan titik-titik pemecahan yang terjadi secara alami dalam data, sehingga memudahkan identifikasi pola atau perbedaan yang ada antar wilayah.

3.3.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab-akibat di antara satu variabel dengan variabel-variabel lainnya. Dalam penelitian ini, perhitungan menggunakan regresi data panel. Data panel adalah gabungan dua buah data yaitu data *cross section* dengan data bentuk *time series* (Basuki dan Prawoto, 2021). Ada beberapa kelebihan dari metode data panel, yaitu pertama, data panel yang merupakan gabungan antara data bentuk *cross section* dengan data bentuk *time series* sehingga mampu menyediakan lebih banyak data sehingga akan berpengaruh pada derajat kebebasan (*degree of freedom*) dengan nilai lebih besar. Kelebihan kedua, informasi dari data *cross section* dan *time series* yang digabungkan akan dapat mengatasi permasalahan

yang mungkin timbul ketika menghadapi masalah penghilangan variabel (Basuki dan Prawoto, 2021).

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung faktor-faktor yang berpengaruh pada kemiskinan dan ketimpangan dengan model persamaan yang mengacu pada penelitian Tran dan Le (2021) dengan beberapa penyesuaian.

Metode yang digunakan yaitu regresi metode *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan data panel untuk mengetahui pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) dalam pengujian. OLS atau metode kuadrat terkecil merupakan metode penaksiran menggunakan prinsip meminimumkan jumlah penyimpangan kuadrat antara nilai prediksi dari variabel respon dengan nilai sebenarnya.

Metode OLS harus dapat memenuhi asumsi-asumsi BLUE (singkatan dari *Best Linear Unbiased Estimator*) dalam estimasi interval dan pengujian parameter regresi dari populasi. Asumsi-asumsi yang harus memenuhi BLUE antara lain:

- Model regresi harus linear dalam parameter-parameternya.
- Tidak bersifat multikolinier yaitu variabel bebas tidak bersifat stokastik (bernilai tetap dalam sampel berulang) serta tidak terdapat suatu hubungan linear yang sama persis pada variable-variabel bebasnya.
- Bersifat homoskedastisitas, *Error term* memiliki varians yang konstan pada semua observasi, $E(\epsilon^2) = \sigma^2$.
- *Error term* atau galat pada regresi bernilai harapan nol, $E(\epsilon_i) = 0$.
- Tidak bersifat autokorelasi yaitu *Error term* pada observasi tidak berhubungan dengan *error term* observasi lainnya.
- *Error term* dalam regresi berdistribusi normal.

Menurut Basuki dan Prawoto (2021), metode data panel memiliki beberapa kelebihan dibandingkan metode lainnya, antara lain yaitu:

1. Memperhitungkan Heterogenitas Individu

Panel data dapat secara eksplisit memperhitungkan perbedaan individu dengan memungkinkan adanya variabel yang spesifik untuk tiap individu.

2. Menguji dan Membangun Model Perilaku yang Lebih Kompleks
Kemampuan untuk mengontrol heterogenitas individu memungkinkan penggunaan data panel untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih rumit.
3. Cocok untuk *Study of Dynamic Adjustment*
Data panel mengandalkan observasi *cross-section* yang berulang (time series), sehingga sangat cocok digunakan dalam penelitian yang menganalisis penyesuaian dinamis.
4. Jumlah Observasi yang Tinggi
Tingginya jumlah observasi membuat data panel lebih informatif, lebih variatif, dan mengurangi masalah kolinearitas (multikol), serta meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*), yang menghasilkan estimasi yang lebih efisien.
5. Memodelkan Perilaku yang Kompleks
Data panel memungkinkan untuk mempelajari model-model perilaku yang lebih kompleks, memberikan wawasan yang lebih mendalam.
6. Meminimalkan Bias Agregasi Data Individu
Penggunaan data panel dapat mengurangi bias yang mungkin muncul akibat penggabungan data individu dalam analisis.

Dengan manfaat ini, tidak perlu memvalidasi asumsi konvensional pada model perhitungan data panel. Penelitian data panel tidak mengharuskan terpenuhinya semua asumsi klasik regresi linier, yang berarti dapat mengidentifikasi parameter tertentu tanpa membuat asumsi yang kaku.

3.3.4 Pengujian Pemilihan Permodelan

Data panel adalah gabungan dua buah data yaitu data *cross section* dengan data bentuk *time series*. Regresi dengan data panel menggunakan beberapa model pendekatan untuk mengestimasi data panel yaitu pendekatan secara *Common Effect Model*, *Fixed Effects Model* serta *Random Effect Model* (Basuki dan Prawoto, 2021).

a) *Common Effect Model (CEM)*

Pendekatan model common effect merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya menggabungkan data time series dan cross section. Dalam model ini, waktu dan dimensi individual tidak dipertimbangkan, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai periode waktu. Metode ini dapat menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk memperkirakan model data panel.

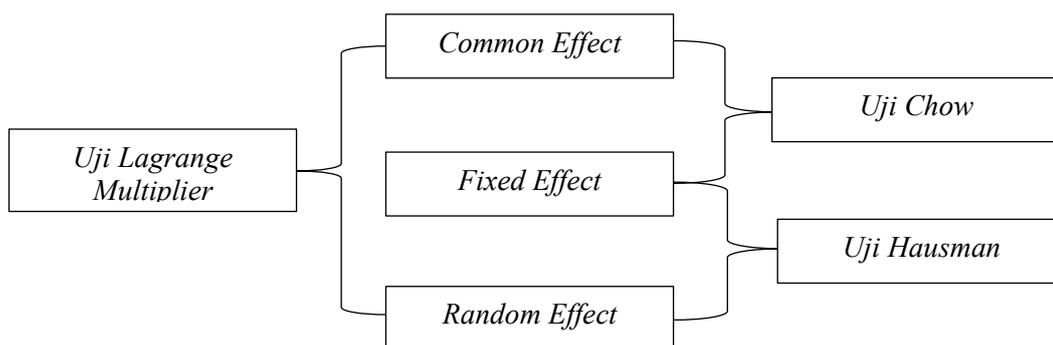
B) *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersep mereka. Untuk memperkirakan data panel, model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Perbedaan intersep dapat terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun, kemiringannya sama antar perusahaan. Model estimasi ini juga sering disebut sebagai *Least squares Dummy Variable (LSDV)*.

C) *Random Effect Model (REM)*

Model ini akan memperkirakan data panel di mana variabel gangguan mungkin saling terkait lintas waktu dan antar individu. Dalam model Efek Acak, perbedaan intersepsi diakomodasi oleh ketentuan kesalahan masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut *Error Component Model (ECM)* atau Teknik *Generalized Least Square (GLS)*

Untuk menentukan model yang terbaik di antara *common effect (pool)*, *fixed effect*, serta *random effect* maka dapat digunakan dua macam Teknik estimasi model. Kedua teknik ini digunakan dalam perhitungan regresi data panel untuk dapat memperoleh model yang paling tepat dalam mengestimasi perhitungan regresi data



Gambar 3. 1 Pemilihan Model Dalam Data Panel

panel. Dua macam uji yang digunakan, yaitu pertama adalah *Chow test* yang digunakan untuk memilih di antara model *common effect (pooled)* ataukah model *fixed effect*. Yang kedua, yaitu *Hausman test* yang digunakan untuk menentukan antara model *fixed effect (tetap)* atau *random effect (acak)* yang lebih baik dalam melakukan estimasi regresi data panel.

1. Uji Chow

Jika Anda mencoba memutuskan antara model efek umum dan efek tetap, uji Chow dapat membantu Anda. Uji Chow mengasumsikan dua hipotesis: pertama, bahwa penampang tidak menunjukkan heterogenitas apa pun, dan kedua, bahwa tidak ada heterogenitas individual. Uji ini didasarkan pada asumsi berikut:

H₀: Model yang tepat digunakan adalah *common effect model*.

H_a: Model yang tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai probabilitas *cross-section* dari *chi-square* $< \alpha$ 0,05 maka H₀ ditolak. Model terpilih adalah *fixed effect*. *Hausman Test* dapat dilakukan untuk pengujian selanjutnya.
- b. Jika nilai probabilitas *cross-section* dari *chi-square* $> \alpha$ 0,05 maka H₀ gagal ditolak. Model terpilih adalah *common effect*. *Langrange multiplier* dapat dilakukan untuk pengujian selanjutnya..

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk memilih antara dua model, yaitu *fixed effect* dan *random effect* yang lebih baik dan tepat digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, tujuan dari uji Hausman untuk mengetahui karakteristik masing-masing model apakah mempunyai heterogenitas. Hipotesis dalam uji Hausman dapat ditulis sebagai berikut:

H₀: Model yang tepat adalah *random effect model*.

H_a: Model yang tepat adalah *fixed effect model*.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai probabilita *cross-section* dari *chi-square* $< \alpha$ 0,05 maka H₀ ditolak. Model yang terpilih adalah *fixed effect* untuk mengestimasi data panel. *Lagrange Multiplier Test* tidak perlu dilakukan pada tahap uji selanjutnya.
- b. Jika nilai probabilita *cross-section* dari *chi-square* $> \alpha$ 0,05 maka H₀ gagal ditolak. Model yang terpilih adalah *random effect* untuk mengestimasi data panel. *Lagrange Multiplier Test* perlu dilakukan pada tahap uji selanjutnya.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model terbaik dalam penelitian, yaitu antara model *common effect* atau model *random effect*. Dalam pengujian ini dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H₀: Model yang tepat adalah *common effect*.

H_a: Model yang tepat adalah *random effect*.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Apabila nilai probabilita *cross-section* dari *breusch-pagan* $< \alpha$ 0,05 dapat diartikan H₀ ditolak. Model yang terpilih adalah *random effect* untuk mengestimasi data panel.
- b. Apabila nilai probabilita *cross-section* dari *breusch-pagan* $> \alpha$ 0,05 dapat diartikan H₀ gagal ditolak. Model yang terpilih adalah *common effect* untuk mengestimasi data panel.

3.3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi dalam penelitian supaya hasilnya *BLUE* atau *Best Linear Unbiased Estimator* (Basuki dan Prawoto, 2021). Oleh karena itu perlu dilakukan uji asumsi klasik terhadap model yang digunakan, meliputi pengujian normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dengan *Jarque Bera* atau *JB-Test* adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diamati berasal dari distribusi normal atau tidak. Langkah-langkah dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis

$$H_0 : \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) \text{ (error berdistribusi normal)}$$

$$H_1 : \varepsilon_i \not\sim N(0, \sigma^2) \text{ (error berdistribusi tidak normal)}$$

2. Menentukan taraf signifikansi ($\alpha=5\%$)

3. Statistik Uji: *Jarque Bera*

Kriteria pengujian dalam *Jarque Bera* sebagai berikut :

- a. Jika p-value $\leq 5\%$ (tolak H_0) maka *error* tidak berdistribusi dengan normal.
- b. Jika p-value $> 5\%$ (gagal tolak H_0) maka *error* berdistribusi dengan normal.

Uji Homoskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian dari *error* model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak homokedastis atau dengan kata lain tidak konstan. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat digunakan metode uji *glejser*. Uji *glejser* memodelkan antara absolut *error* dengan seluruh variabel independen. Pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis

$H_0 : Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$ (*varians error konstan*)

$H_1 : Var(\varepsilon_i) \neq \sigma^2$ (*varians error tidak konstan*)

2. Menentukan taraf signifikansi ($\alpha=5\%$)
3. Kriteria pengujian dalam Uji Glejser adalah sebagai berikut :
 - a. Jika p-value $\leq 5\%$ (tolak H_0) maka *varians error* konstan.
 - b. Jika p-value $>5\%$ (gagal tolak H_0) maka *varians error* tidak konstan.

Uji Non-Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel independen. Pengujian multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan VIF.

Formula dalam penghitungan VIF adalah sebagai berikut:

$$VIF_k = \frac{1}{1 - R_k^2}$$

VIF menunjukkan bagaimana varians dari sebuah estimator ditingkatkan oleh keberadaan multikolinieritas. Seiring dengan R^2 mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga.

Keputusan dalam pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- a. Jika $VIF \geq 10$ maka terdapat multikolinieritas antar variabel bebas.
- b. Jika $VIF < 10$ maka tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara spurious error periode t dengan spurious error periode sebelumnya (t-1) pada model regresi linier (Ghozali, 2016). Autokorelasi terjadi karena pengamatan yang berurutan saling berkaitan satu sama lain sepanjang waktu. Oleh karena itu, model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami autokorelasi. Dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (uji DW) sebagai uji autokorelasi .

Ada tidaknya autokorelasi dapat ditentukan dengan menggunakan nilai d (koefisien DW) dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila nilai d (koefisien DW) berada pada batas atas (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan 0 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.
- 2) Jika nilai d (koefisien DW) lebih kecil dari batas bawah (dl) maka koefisien autokorelasi lebih besar dari 0 berarti terjadi autokorelasi positif.
- 3) Jika nilai d (koefisien DW) lebih besar dari ($4-dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari 0 yang berarti terdapat autokorelasi negatif.
- 4) Jika nilai d (koefisien DW) antara batas bawah dan atas atau antara ($4-dl$) dan ($4-du$) bernilai negatif, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan dengan jelas. Artinya regresi tanpa autokorelasi.

3.3.6 Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan atau Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Basuki dan Prawoto, 2021). Adapun langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :

Hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$ (tidak terdapat pengaruh variabel independen signifikan atau model tidak dapat hubungan antar variabel)

$H_1 : \text{minimal terdapat satu } \beta_k \neq 0$ (minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen)

Tentukan taraf signifikan (α) = 0,05

Statistik uji :

$$F_{hitung} = \frac{MSR}{MSE}$$

Keputusan

Tolak H_0 jika $p\text{-value}$ kurang dari 0,05

3.3.7 Uji Goodness of Fit (Uji Adjusted R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan syarat hasil uji F dalam analisis regresi bernilai signifikan. Nilai R^2 berada diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$),

dimana apabila nilai mendekati angka 1 maka variabel independen dan dependen memiliki hubungan yang semakin dekat. Jika terdapat lebih dari dua variabel, maka yang digunakan adalah nilai *adjusted*² (Basuki dan Prawoto, 2021). Adapun kriteria keputusannya yaitu:

- a. Apabila nilai *adjusted R*² mendekati 1, maka hasil tersebut menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan variabel dependen.
- b. Apabila nilai *adjusted R*² mendekati 0, maka hasil tersebut menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara variabel independen dengan variabel dependen.

50

3.3.8 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t, sedangkan uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi dan uji statistik F. Koefisien determinasi berasal dari hasil nilai *R-square* regresi, sedangkan uji statistik F berasal dari hasil nilai *F-statistic*. Basuki dan Prawoto (2021) mengatakan bahwa uji t-statistik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk uji-t adalah:

- a. Apabila $\text{sig } t < \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak. Artinya, variabel independent berpengaruh secara terhadap variabel dependen secara signifikan.
- b. Apabila $\text{sig } > \alpha$ (0,05) maka H_0 gagal ditolak. Artinya, variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

Statistik uji :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_k}{S_{\beta_k}}$$

Keputusan :

Tolak H_0 jika *p-value* kurang dari 0,05

3.3.9 Pembentukan Model Penelitian

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis panel data *multiple regression*. Pembentukan model penelitian dilakukan setelah seluruh uji pemilihan model terbaik dan uji asumsi klasik telah terpenuhi. Model penelitian ini menguraikan pengaruh variabel independent, yaitu Lag dari Kemiskinan, Indeks Inklusi Keuangan, dan Inflasi Tahunan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan. Adapun model yang akan dibentuk adalah sebagai berikut :

$$pov_{it} = \alpha + \beta_1 pov_{i(t-1)} + \beta_2 iik_{it} + \beta_3 inflasi_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

pov_{it} : Tingkat Kemiskinan provinsi i tahun t (%)

$pov_{i(t-1)}$: Tingkat Kemiskinan provinsi i tahun t-1 (%)

Iik_{it} : indeks inklusi keuangan (satuan)

$inflasi_{it}$: tingkat perubahan IHK provinsi i tahun t (%)

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, telah diperoleh kesimpulan dari analisis regresi yang dilakukan, dengan nilai adjusted R-Square sebesar 99,59%, yang menunjukkan bahwa model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan variasi kemiskinan di Pulau Sumatera. Berikut adalah kesimpulan berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan:

1. Perkembangan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) di wilayah Sumatera selama periode 2017 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang beragam antarprovinsi. Beberapa daerah mengalami peningkatan signifikan, sementara sebagian lainnya justru stagnan atau menurun. Tahun 2023 Provinsi dengan indeks tertinggi adalah Riau dengan skor 0,558, disusul oleh Kepulauan Riau 0,554 dan Lampung 0,545.
2. Indeks Inklusi Keuangan (IIK) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dimana peningkatan inklusi keuangan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera.
3. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kemiskinan di masyarakat di Pulau Sumatera.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Kesimpulan yang telah diperoleh, Indeks Inklusi Keuangan (IIK) dan Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan temuan ini saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- Mengingat IIK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pemerintah sebaiknya fokus pada upaya peningkatan akses ke layanan keuangan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti di provinsi xx. Program seperti pemberian layanan perbankan kepada kelompok masyarakat yang belum terlayani atau peningkatan literasi keuangan akan sangat membantu mengurangi kemiskinan di Pulau Sumatera.
- Inflasi terbukti berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa kenaikan harga yang tinggi dapat memperburuk keadaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, dengan memperkuat kebijakan moneter dan memperhatikan sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga seperti pangan dan energi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Analisis Regional Lebih Mendalam
Peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis lebih mendalam pada seluruh provinsi di Indonesia maupun tingkat kabupaten/kota untuk memahami variasi kemiskinan yang lebih detail. Mungkin saja ada faktor-faktor lokal yang tidak tercakup dalam penelitian ini yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di masing-masing daerah.
- Memperluas Variabel dalam Model
Penelitian selanjutnya bisa mencoba memasukkan variabel lain, seperti tingkat pengangguran, kebijakan fiskal daerah, atau bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat, yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan lebih jelas. Peneliti juga dapat menggunakan variabel ekonomi mikro untuk mendapatkan detail yang lebih jelas sebagai penyebab kemiskinan, seperti tingkat pendidikan, pengalaman bekerja, dan lain-lain.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dilengkapi kedepannya oleh peneliti lain. Pertama, meskipun model regresi yang digunakan menunjukkan nilai adjusted R-Square yang sangat tinggi, penelitian ini hanya mempertimbangkan variabel-variabel ekonomi makro, seperti Indeks Inklusi Keuangan (IIK) dan Inflasi yang mungkin belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas penyebab kemiskinan. faktor mikro, belum dijadikan bagian dari analisis, faktor-faktor tersebut mungkin berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di tingkat provinsi. Kedua, penelitian ini terbatas pada 10 provinsi di Pulau Sumatera, sehingga temuan yang ada mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk wilayah Indonesia lainnya, mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berbeda di tiap daerah. Ketiga, waktu yang digunakan pada penelitian ini hanya 6 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2023, pada waktu-waktu tersebut terdapat kondisi tidak normal seperti Covid-19 yang dapat berdampak pada hasil pemodelan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amagir, A., van den Brink, H. M., Groot, W., & Wilschut, A. (2022). SaveWise: The impact of a real-life financial education program for ninth grade students in the Netherlands. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 33, 100605.
- Anetor, F. O., Esho, E., & Verhoef, G. (2020). The impact of foreign direct investment, foreign aid and trade on poverty reduction: Evidence from Sub-Saharan African countries. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1737347.
- Ariani, K. F., Rahmawati, T. I., & Anggraini, D. V. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 118-128.
- Asep Deni, M. M., Hirbasari, I. A., Taryono, S. E., Iswahyudi, M. S., Heppi Syofya, S. E., Soeharjoto, S. E., & Humaidah Muafiqie, S. E. (2024). *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN*. CV Rey Media Grafika.
- Assel, M. R., Hanoeboen, B. R. A., Laitupa, A. A., & Saptanno, F. (2022). Forecasting Macroeconomic Variables and their Effect on Poverty. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 25(3), 322-337.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 160.
- Becker, G. S. (1995). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Behnezhad, S., Razmi, M. J., & Sadati, S. M. (2021). The role of institutional conditions in the impact of economic growth on poverty. *International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research (IJBESAR)*, 14(2), 78-85.
- Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson Education.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.
- BPS - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). *Angka Partisipasi Murni Indonesia 2023*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id>

- BPS - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). *Indeks Harga Konsumen Indonesia 2023*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id>
- BPS - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2023). *Produk Domestik Bruto Indonesia 2023*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id>
- Cruz, M., & Ahmed, S. A. (2018). On the impact of demographic change on economic growth and poverty. *World development*, 105, 95-106.
- Evi, T. (2023). *Transformasi Transaksi Tunai ke Digital di Indonesia*. CV. AA. Rizky.
- Fadlan, A., & Lubis, R. P. (2023). The influence of inflation on the poverty level in Medan City: A case study of labor and human resources. *Journal of Management and Business Innovations*, 5(01), 35-46.
- Feenstra, R. C. (2020). *Advanced International Trade: Theory and Evidence*. Princeton University Press.
- Ghosh, A., & Gupta, S. (2021). *Economic Growth and Development*. Routledge.
- Ghosh, A., & Gupta, S. (2021). *Economic Growth and Development*. Routledge.
- Hasbullah, H., Murti, W., Jasin, M., & Nugroho, Y. (2022, January). Determinants of Economic Growth and its Impact on Poverty in Lampung Province. In *MIC 2021: Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia* (p. 99). European Alliance for Innovation.
- Hofmarcher, T. (2021). *The effect of education on poverty: A European perspective*. *Economics of Education Review*, 83, 102124.
- Hossain, M. (2019). *Globalization and Economic Development: The Role of Trade*. Cambridge University Press.
- IMF. (2021). *World Economic Outlook: Growth Projections*. International Monetary Fund.
- Inoue, T. (2019). Financial inclusion and poverty reduction in India. *Journal of Financial Economic Policy*, 11(1), 21-33.
- Inoue, T. (2019). Financial inclusion and poverty reduction in India. *Journal of Financial Economic Policy*, 11(1), 21-33.
- Iyer, P. P. (2024). *Impact of Inflation on Poverty: A case of BRIC Economies*.
- Khan, M. (2022). *Macroeconomic Policy and Economic Growth: Evidence from Developing Economies*. Palgrave Macmillan.

- Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2020). Effect of financial inclusion on poverty and vulnerability to poverty: Evidence using a multidimensional measure of financial inclusion. *Social Indicators Research*, 149(2), 613-639.
- Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy*. 10th Edition. Pearson Education.
- Kuldasheva, Z., Qadamboevich, B. S., BALBAA, M. E., & ISMAILOVA, N. (2023). Impact of Education and Employment on Poverty. *Journal of Sustainable Development and Green Technology*, 2(1).
- Majid, R. (2021). *Dasar Kependudukan*. Penerbit Nem.
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics* (10th ed.). Cengage Learning.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics*. 9th Edition. Cengage Learning.
- Miller, R. L., & Benjamin, L. (2020). *The Economics of Development and Planning*. PHI Learning.
- Miller, R. L., & Benjamin, L. (2021). *The Economics of Development and Planning*. PHI Learning.
- Mishkin, F. S. (2020). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (11th ed.). Pearson.
- Murtadlo, K., & Sulhan, M. (2023). Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 8(1), 90-104.
- Ningrum, E. P., Sumarno, M., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 116-126.
- OECD. (2021). *OECD Economic Outlook: Growth Analysis and Projections*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2022). *OECD Employment Outlook 2022*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of economic structures*, 9(1), 37.
- Park, C.-Y., & Mercado, R. J. (2015). Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality Developing Asia. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2558936>

- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542-1548.
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Salvatore, D. (2019). *International Economics*. 12th Edition. Wiley.
- Sharma, R., & Agrawal, A. (2020). *Trade Liberalization and Poverty: The Impact on Agricultural Sector*. Springer.
- Simanjuntak, W., Marpaung, R. Y., Marpaung, R. Y., Simbolon, S. R., Sianipar, R. E., & Nainggolan, D. F. (2024). Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Siswa dalam Melanjutkan Jenjang Pendidikan yang Lebih Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 772-780.
- Stern, N. (2019). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
- Suroso, W., & Susilo, D. (2021). *Regional Economic Development in Indonesia: Analysis of PDRB and Its Impacts*. *Journal of Indonesian Economic Studies*, 32(2), 123-135.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson.
- Tran, H. T. T., & Le, H. T. T. (2021). The impact of financial inclusion on poverty reduction. *Asian Journal of Law and Economics*, 12(1), 95-119.
- United Nations. (2021). *World Population Prospects 2021*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- World Bank. (2022). *World Development Indicators 2022*. Diakses dari: <https://data.worldbank.org>
- World Bank. (2022). *World Development Indicators 2022*. Diakses dari: <https://data.worldbank.org>